**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



## STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN MINAT INVESTASI DI PROVINSI RIALI

Stevanie Jonita<sup>1\*</sup>, Dita Fisdian Adni<sup>2</sup>

Universitas Islam Riau<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Stevaniejonita19@gmail.com, <sup>2</sup>Ditafisdianadni@gmail.com

Received: 17-03-2025 Revised: 20-04-2025 Approved: 27-05-2025

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan minat investasi di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Riau menerapkan empat strategi utama dalam meningkatkan minat investasi, yaitu Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastruktur Marketing, dan People Marketing. Strategi-strategi ini berfokus pada pembentukan citra positif, promosi potensi daerah, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan strategi DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Strategi Pemasaran, Investasi, Image Marketing, Attraction Marketing

#### **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya pemerintah adalah organisasi yang memberikan dam menjalankan pelayanan baik kepada Masyarakat luas, karena pada dasarnya pemerintah ada dan dibentuk menjadi pelayanan public (Maryam, 2016). Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2009 perilai pelayanan public ialah sekelompok kegiatan yang menjadi pemuas dan pemenuh kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara republic Indonesia dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan yang diberikan pemerintah guna menyejahterahkan kehidupan bangsa dan negara. Pemerintah merupakan organisasi yang bekerja dan mengelolasistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan pemerintah baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas (Puasa et al., 2018). Penanaman modal memiliki kaitan erat dengan urusan pemerintahan, terutama dalam konteks desentralisasi (Nur Wijayanti, 2017). Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengelola penanaman modal yang bersifat wajib tidak pelayanan dasar, termasuk dalam bidang administrasi penanaman modal. Hal ini mencakup pemberian izin dan persetujuan investasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investor, baik domestik maupun asing. Dengan demikian, penanaman modal menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penanaman modal juga terkait dengan pengaturan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional dan provinsi. Pemerintah pusat menetapkan regulasi umum, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan di lapangan.

Penanaman modal terbagi menjadi dua macam, yang pertama investasi pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kurniawan, 2016). Pada umumnya investasi yang dilakukan

# $\label{lem:continuous} \textbf{Journal of Governance and Public Administration} \ (\textbf{JoGaPA})$

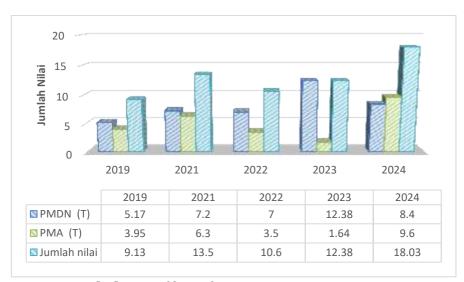
**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



pemerintah tidak di jelaskan mengenai memperoleh keuntungan (Maksum, 2010). Yang Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional vaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan (Sunariyah, 2015). Menurut undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio. Inti dari muatan undang – undang ini adalah mengatur tata cara penanaman modal di Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan pemerataan perekonomian.

Agar mencapai hasil akhir yang di inginkan dalam mewujudkan visi dan misi atau tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat menjadi DPMPTSP itu, maka diperlukan suatu rencana kerja yang strategis. Rencana strategis tersebut mencangkup gambaran umum mengenai apa yang ingin dicapai baik dalam segi kondisi hingga arah kebijakannya. Selain itu, rencana tersebut juga sebagai arahan yang jelas atas kebutuhan yang direncanakan dan dapat memberikan prioritas pada kegiatan agar mewujudkan pelaksanaan yang efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka melaksanakan kegiatan penanaman modal berdasarkan kegiatan dan aktivitasnya, DPMPTSP terus memperbarui dan menerapkan strategi melalui kegiatan baru untuk meningkatkan penanaman modal di kota Pekanbaru. Strategi merupakan komponen yang sangat penting dan berdampak pada tujuan yang dapat dicapai karena strategi merupakan cara kerja organisasi dan seperangkat komitmen terhadap aktivitas atau aktivitas yang memadukan dan berkoordinasi untuk mencari dan mengembangkan kekuatan. Ini mencapai keunggulan kompetitif organisasi (Assuri, 2016).



**Tabel 1.** Grafik Realisasi Investasi 2019-2024 Sumber : Realisasi Investasi Provinsi Riau Tahun 2019-2024

**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



Berdasarkan grafik diatas, bisa dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN dan PMA selalu mengalami perubahan, baik penurunan ataupun peningkatan. Seperti perbandingan pada tahun 2023 dengan 2024, Dimana pada tahun 2023 untuk nilai PMDN senilai Rp. 12,38 Trillium dan PMA 1,64 Trillium sedangkan pada tahun 2024 berdasarkan triwulan ke empat memiliki nilai Rp. 8,4 Trillium untuk PMDN dan Rp. 9,6 Trillium untuk PMA.

Tabel 1. Sektor Keseluruhan Investasi Triwulan IV 20224

No	Sektor	Proyek -	PMDN / PMA		
			Investasi	TKI	TKA
1	Sektor Primer	534	6.582.371.933.694	6.368	1
2	Sektor Sekunder	714	8.533.448.667.036	4.828	14
3	Sektor Tersier	3.519	2.920.846.173.374	3.916	5
JUMLAH 4.76		4.767	18.036.666.774.104	15.112	20

Sumber : Data Perkembangan Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Riau Triwulan IV 2024.

Dari data di atas, dapat di ketahu bahwa total keseluruhan hasil dari sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier pada Triwulan IV 2024, tabel di atas menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor tertinggi yang paling berkontribusi dalam realisasi investasi PMDN dan PMA. Total proyek pada triwulan IV 2024 adalah sebanyak 4.767 dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 18 Triliun rupiah serta menggunakan 15.112 orang tenaga kerja Indonesia dan 20 orang tenaga kerja asing Untuk itu ketiga sektor ini sangat membantu investor dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara ketiga sektor ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif. Berdasarkan dari program yang di laksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Riau yang berkaitan dengan realisasi investasi, dapat di identifikasikan fenomena atau isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang sering terjadi antara lain (Renstra DPMPTSP Provinsi Riau 2019-2024):

- 1) Terindikasi Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA, target realisasi investasi 2024 yang di berikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik yang kemudian di singkat menjadi BKPM RI kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar 106,07 T (6,43% untuk porsi terhadap nasional) dan pada triwulan II (Maret Juni) Provinsi Riau telah mencapai Rp.27,84 T (104,7%) untuk target per triwulan (Januari Juni) telah mencapai Rp. 53,13 T (50,09%) terhadap target tahunan yang telah di tetapkan. Sedangkan perbandingan pada tahun 2023 Triwulan I, Provinsi Riau memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 90 triliun. Namun, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp 25,3 triliun, yang menunjukkan bahwa provinsi ini baru mencapai sekitar 28% dari target yang ditetapkan (Berdasarkan Realisasi Investasi 1 Agustus 2024).
- 2) Terindikasi Belum meratanya penyebaran potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota, sebagai contoh Provinsi Riau memiliki pusat investasi terbesar pada Kabupaten Pelalawan menjadi daerah paling diminati dengan realisasi investasi mencapai Rp 11,3 triliun. Kemudian Kabupaten Indragiri Hilir menyusul dengan realisasi investasi senilai Rp 3,9 triliun

**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



(riau.bpk.go.id) . Namun ada Beberapa daerah seperti Rokan Hulu memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Peta potensi dan peluang investasi di Rokan Hulu menunjukkan adanya sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, namun tantangan dalam infrastruktur dan kebijakan dapat menghambat pertumbuhan ( Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Rokan Hulu).

- 3) Terindikasi Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi, berdasarkan permasalahan sebelumnya tantangan dalam penyebaran investasi pada daerah Rokan Hulu di akibatkan oleh Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur menjadi penghalang bagi investor untuk menanamkan modal, sarana dan prasarana tersebut mencangkup fasilitas infrastruktur jalan kabupaten, jalan nasional, jalan provinsi, hotel, pelabuhan, bandara, terminal, dan lain sebagainya yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah. (https://ric.dpmptsp.riau.go.id).
- 4) 4. Terindikasi Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur fisik dan teknologi untuk mendukung pelayanan perizinan seperti kurangnya sosialisasi mengenai layanan perizinan kepada masyarakat dan permasalahan sistem akses informasi website yang sering bermasalah atau eror yang menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan perizinan secara online (https://dpmptsp.riau.go.id).

#### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini Teknik analisis data yang diterapkan penulis ialah teknik analisis data kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Penganalisisan data penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah berakhirnya pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang didasarkan filsafat pos positivisme, yang dilakukan untuk meneliti dalam keadaan obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, dalam pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini membutuhkan data penelitian berupa dokumen, data-data dan catatan yang bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas tersebut meliputi (Sugiyono, 2022):

- 1) Data Collection (Pengumpulan Data)
- 2) Data Reduction (Reduksi Data)
- 3) Data Display (Penyajian Data)
- 4) Conslusion Drawing/verification (Penarik Kesimpulan/Verifikasi)

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Analisa mendalam kepada literatur yang relevan, maka studi ini menyampaikan penemuan penting terkait Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Minat Investasi di Provinsi Riau.

**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



Peneliti menggunakan teori kuncoro sebagai pegangan dalam melakukan wawancara terhadap responden ataupu key informan dan informan, teori tersebut digunakan berkaitan dengan judul penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi dengan 4 orang yang sebelumnya telah ditanyakan kepada seluruh key informan dan informan sesuai dengan judl penelitian. Maka Analisa penliti terhadap indikator penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Image Marketing atau citra
  - Image marketing atau citra yaitu strategi pemasaran yang berfokus pada pembentukan dan pengembangan citra atau kesan positif mengenai suatu merek, produk, ataupun jasa dimata konsumen atau investor. Hal ini mengacu pada strategi yang di terapkan DPMPTSP dalam meningkatkan minat investaso di Provinsi Riau. Maka indikator pada tahap ini ialah strategi meningkatkan minat investasi ini adalah merupakan indeks yang baik menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi sebagai contoh mempromosikan lewat berbagai media sosial sebagai pendukung untuk promosi investasi agar memperluas jangkauan hingga di luar wilayah lokal dengan memanfaatkan tim kreator sendiri dan fasilitas yang telah di sediakan. Hal ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan daerah, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- 2) Attraction marketing atau daya Tarik
  - Attraction marketing atau daya Tarik ialah strategi pemasaran yang berfokus pada pembentukan dan pengembangandaya Tarik atau kesan yang menarik mengenai suatu destinasi, produk, atau jasa bagi investor atau Masyarakat. Maka dari itu DPMPTSP berupaya menciptakan daya tarik investasi dengan menonjolkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh provinsi Riau. Hal ini meliputi kekayaan sumber daya alam yang beragam seperti perkebunan, kehutanan, energi, serta potensi di sektor kesehatan, pendidikan, wisata, dan budaya. Kemudian Lokasi dan tempat yang strategis dengan Pelabuhan atau bandara yang memudahkan distribusi barang dan jasa. Serta keindahan alam dan warisan budaya sosial juga dapat di promosikan seperti tempat bersejarah dan keindahan alam untuk menarik investor di sektor pariwisata.
- 3) Infrastruktur marketing atau infrastruktur sarana dan prasarana Infrastruktur marketing atau infrastruktur sarana dan prasarana merupakan strategi yang melakukan pemasaran dan berfokus pada pembentukan ataupun pengembangan infrastruktur sarana prasarana atau infrastruktur pendukung lain guna mendukung kegiatan investasi maupun bisnis di suatu daerah. DPMPTSP menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam menarik investasi ke Provinsi Riau. Oleh karena itu, DPMPTSP berupaya untuk: yanag pertama memastikan ketersediaan infrastruktur dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik memudahkan mobilitas dan komunikasi antar warga, mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan damai di tengah Masyarakat. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah pusat dengan melakukan prioritas Pembangunan pada infrastruktur sarana

**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



dan prasarana lainnya sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Dengan infrastructure marketing yang efektif, DPMPTSP berharap dapat menarik lebih banyak investasi ke Provinsi Riau dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

4) People marketing atau orang pemasaran

People marketing atau orang pemasaran adalah strategi pemasaran yang befokus pada pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia yang efektif dalam mempromosikan dan meningkatkan minat investasi di suatu DPMPTSP mengimplementasikan people marketing dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi investasi di Riau. Melalui pendekatan ini, DPMPTSP bertujuan untuk: melakukan analisa untuk perkembangan ke depan terhadap permasalahan dan tantangan yang di hadapi oleh investor guna membangun kepercayaan dan koneksi atau hubungan yang personal atau dengan mitra UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi. Yang kedua dengan mempertahankan dan meningkatkan objek perkebunan dan pertambangan yang menjadi daya pusat investor seperti reklamasi dan pemulihan lahan, penggunaan metode penambangan yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Yang ke tiga melakukan kepatuhan terhadap regulasi, Tingkat kepatuhan investor dalam memenuhi persyaratan perizinan dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) per triwulan ataupun per enam bulan juga mencerminkan komitmen mereka untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke empat memberikan peningkatan kualitas pelayanan dalam menerapkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus izin usaha. Dan terakhir pemberian insentif, dengan Menawarkan insentif atau keuntungan tambahan bagi investor, seperti dividen atau program loyalitas, dapat memperkuat komitmen mereka terhadap perusahaan. Dengan menerapkan komitmen investor dapat diimplementasikan melalui pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat dari pemerintah daerah, serta dukungan infrastruktur dan regulasi yang kondusif dan terpenting memberikan jangka panjang berkomitmen investasi antar perusahaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan partisipasi investor di Provinsi Riau.

### **KESIMPULAN**

Bahwa Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Minat Investasi di Provinsi Riau dapat di lakukan dengan efektif apabila selalu meliputi tahap Image Marketing atau citra dengan membentuk citra positif mengenai realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Strategi yang diterapkan berfokus pada kemudahan investasi, promosi potensi daerah. pengembangan infrastruktur, dan penciptaan kemitraan. Kemudian Attraction Marketing atau daya tarik dengan menampilkan Promosi potensi mempromosikan peluang investasi di berbagai sektor, seperti perkebunan, kehutanan, energi, serta sektor kesehatan, pendidikan, wisata, dan budaya melalui forum investasi, pameran, dan pertemuan dengan investor dari berbagai negara. Lalu Infrastruktur Marketing atau infrastruktur sarana dan prasarana dengan melakukan Pengembangan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kondisi jalan, transportasi, ataupun sarana pendukung seperti

**Volume 2, No 3 – Juni 2025** 

e-ISSN: 3031-7584



listrik, dan air bersih. Dan terakhir pada People Marketing atau orang pemasaran, dengan melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bisa dengan melakukan Kemitraan dan kolaborasi juga menjadi strategi kunci. Dengan strategi yang komprehensif dan terukur, DPMPTSP Provinsi Riau berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik minat investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan DPMPTSP dalam mencapai tujuan ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Assuri, A. (2016). Strategi Organisasi dalam Pencapaian Tujuan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Buku Akademik.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (2024). Laporan Realisasi Investasi Tahun 2024. Diakses dari <a href="https://ric.dpmptsp.riau.go.id">https://ric.dpmptsp.riau.go.id</a>
- Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(4), 1–9. https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i4.3005
- Maksum, M. (2010). Manajemen Investasi Wakaf Uang. Mugtasid, 1, 1–20.
- Maryam, N. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalu Palyanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI*(1), 1–18.
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/2112 0/20831
- Sugiyono, A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan dan Aplikasinya dalam Penelitian Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, A. (2022). Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis dan Sosial. Jakarta: Penerbit Andi.
- Sunariyah, S. (2015). Dasar-dasar Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Citra Aditiya.